



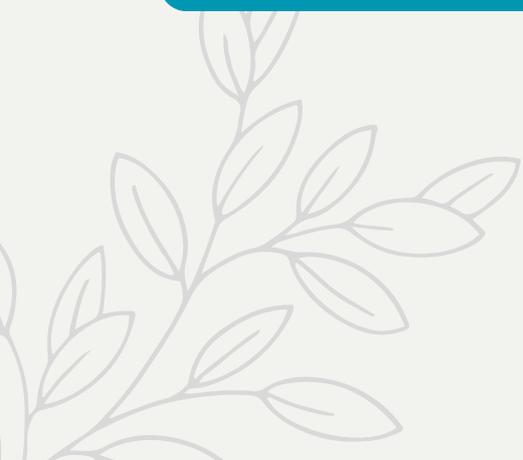
Rencana Kerja



BP2SDM TAHUN 2024



KEMENTERIAN LHK





BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : SK. 32 /P2SDM/SET.11/KEU.0/12/2023

**TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan khususnya terkait penyuluhan dan pengembangan SDM LHK perlu disusun Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tentang Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

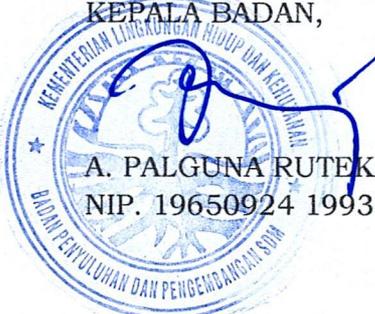
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111).
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253).
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor P.5/P2SDM/SET.11/SET.1/11/2022 tentang Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan;
22. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor P.6/P2SDM/SET.11/DIK.0/12/2022 tentang Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Peltihan Kehutanan;
21. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 – 2024; dan
22. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2024.
- KESATU : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan P2SDM ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2024 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai kerangka kerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 maupun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2024 ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja Eselon II dan UPT lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam menyusun rencana kerja di unit kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2024 merupakan penyesuaian Sasaran dan Indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2024, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Desember 2023
KEPALA BADAN,


A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA NOMOR : SK.32 /P2SDM/SET.11/KEU.0/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2024



PENGANTAR KEPALA BADAN P2SDM

Pemerintah pada tahun 2024 akan memfokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kementerian LHK mengusung tema pembangunan tahun 2024 yaitu “Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”. Adapun Badan P2SDM akan berupaya melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan LHK tersebut melalui peningkatan kapasitas SDM LHK.

Penyusunan Rencana Kerja BP2SDM tahun 2024 didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (revisi); serta Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2024. Pada Tahun 2024, Badan P2SDM berfokus pada pemenuhan capaian target pada Renstra 2020-2024 melalui langkah-langkah perbaikan yang

mencakup penggunaan metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif, kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Badan P2SDM mendukung ke dalam tiga program di Kementerian LHK yaitu “Program Dukungan Manajemen”; “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” dan “Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi”.

Dokumen Rencana Kerja berisi target kinerja dan anggaran BP2SDM Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan dari tema pembangunan LHK tahun 2024. Rencana kerja ini menjadi acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024 di lingkup satuan kerja Badan P2SDM.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita untuk dapat bekerja dengan optimal, jujur, integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Jakarta, 4 Desember 2023

Kepala Badan P2SDM

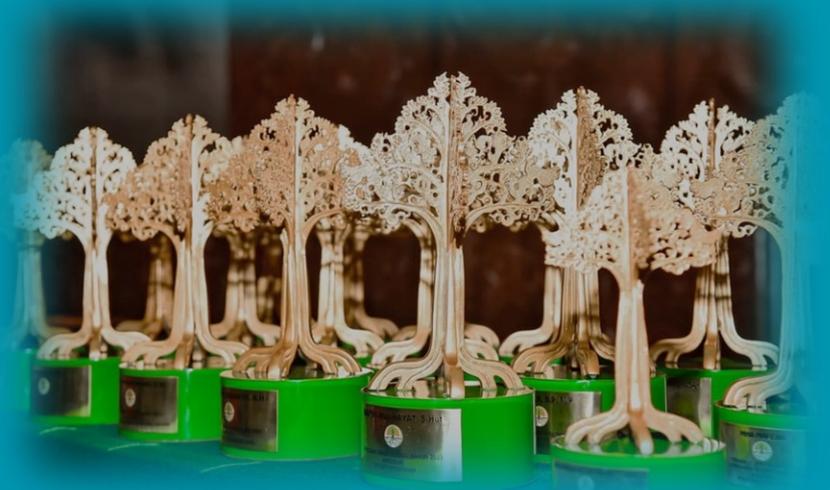

A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Keputusan Kepala Badan P2SDM.....	i
Pengantar Kepala Badan P2SDM	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi Badan P2SDM	3
1.4 Sumber Daya Manusia pada Badan P2SDM	5
1.5 Pengarusutamaan	5
II. CAPAIAN KINERJA BP2SDM	8
2.1 Capaian Kinerja Tahun 2022	8
2.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d November 2023	12
2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023	16
III. RENCANA KERJA TAHUN 2024	18
3.1 Peta Sasaran Program	21
3.2 Indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2024	23
3.3 Nilai Pengelolaan Kinerja sebagai Dasar Pemberian Penghargaan dan Sanksi	32
3.4 Alokasi Pendanaan Badan P2SDM Tahun 2024	32
IV. PENUTUP	35
V. LAMPIRAN	36
Matriks Cascading Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	37
Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	41
Pohon Kinerja Badan P2SDM	48

DAFTAR TABEL

	HAL
TABEL 1. UNIT KERJA PUSAT DAN UPT PADA BADAN P2SDM	4
TABEL 2. SISTEM INFORMASI PADA BADAN P2SDM	7
TABEL 3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM TAHUN 2022	10
TABEL 4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2023	13
TABEL 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM TAHUN 2023	14
TABEL 6. INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2024	24
TABEL 7. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM ..	30



DAFTAR GAMBAR

	Hal
GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3
GAMBAR 2. DATA SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM TAHUN	5
GAMBAR 3. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM TAHUN 2022	9
GAMBAR 4. REALISASI ANGGARAN BADAN P2SDM PER KEGIATAN TAHUN 2022	12
GAMBAR 5. CAPAIAN ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA DAN JENIS BELANJA TAHUN 2023	16
GAMBAR 6. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 1	19
GAMBAR 7. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 3	20
GAMBAR 8. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 6	21
GAMBAR 9. DUKUNGAN BP2SDM DALAM PROGRAM KEMENTERIAN LHK	22
GAMBAR 10. CASCADING PETA ARSITEKTUR BADAN P2SDM	23
GAMBAR 11. RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BP2SDM TAHUN 2024	33
GAMBAR 12. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL BP2SDM TA 2024	33
GAMBAR 13. ALOKASI ANGGARAN PER SATUAN KERJA PER SUMBER DANA	34



Penampilan Siswa SMKKN Pekanbaru



Pameran dan Edukasi anak Pramuka terkait sampah rumah tangga



17 Tahun Adiwiyata

I. PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode pembangunan 2020-2024. Tahun ini menjadi momen Badan P2SDM dalam mengejar pencapaian target Renstra 2020-2024 yang belum dapat dipenuhi pada tahun 2020-2023, sekaligus memberikan landasan yang kuat dalam penyusunan Renstra periode 2025-2029.

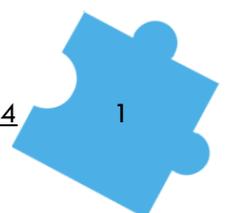
Selama ini Kementerian LHK terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup. Peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup ini tidak terlepas dari kontribusi SDM pengelola sumber dayanya. Mereka harus dapat bersaing secara global, dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi global. Kebijakan Pemerintah tidak hanya pada peningkatan kualitas sumber daya alamnya saja, tetapi juga pada sumber daya manusianya.

Sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2024, Makro Ekonomi Pembangunan LHK adalah:

1. Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon
2. Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk pemerataan pembangunan wilayah
3. Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNBPNP dan meningkatkan kualitas belanja dan sinergi pendanaan Kementerian, sebagai upaya peningkatan *value for money* termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK
4. Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BP2SDM Tahun 2020-2024 (Revisi), rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **“Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Dalam mendukung pencapaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, BP2SDM tetap berfokus pada peningkatan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi; peningkatan peran penyuluh dan lembaga pelatihan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas); penyempurnaan revitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan; Pengembangan SDM yang berorientasi Wirausaha Kreatif di bidang LHK; Pengembangan Gerakan Peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup pada lembaga/komunitas masyarakat maupun sekolah; serta Pemantapan Sistem Administrasi dan



Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Selain itu, Badan P2SDM melakukan pemantauan terhadap dampak intervensi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok masyarakat serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan melalui penghitungan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan yang telah didampingi. Penetapan nilai transaksi ekonomi sebagai indikator dalam dokumen perencanaan ini juga sekaligus dapat memotivasi Penyuluh Kehutanan pendamping dan KTH untuk dapat terus aktif mengembangkan usaha produktif KTH.

Sebagai tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis BP2SDM Tahun 2020-2024, BP2SDM menyusun beberapa langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian capaian atau meminimalkan gap capaian target kegiatan Renstra BP2SDM. Percepatan pencapaian target ini antara lain dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada kegiatan yang memiliki gap capaian masih tinggi, memprioritaskan alokasi anggaran yang mendukung Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional / PN), menggunakan metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien, seperti meminimalkan jumlah hari dan satuan biaya per angkatan dalam pelatihan SDM agar dapat mencakup lebih banyak target dan mengutamakan penggunaan pembelajaran jarak jauh (*e-learning* dan *blended learning*) untuk lebih mengefisiensi waktu dan biaya pelaksanaan pelatihan, dan serta menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam melaksanakan kegiatan.

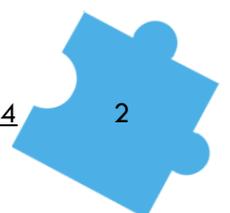
Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM tahun 2024 ini merupakan penjabaran rencana kerja Kementerian LHK Tahun 2024 dan rencana strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (revisi) yang berisi rincian kegiatan dan strategi pelaksanaan yang akan dilakukan oleh Badan P2SDM dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja lingkup Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan struktur dan organisasi tata kerja Kementerian LHK pada Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDM unggul tersebut, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berperan dalam menjamin kecukupan SDM LHK yang berkualitas dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Badan P2SDM adalah menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan serta memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;

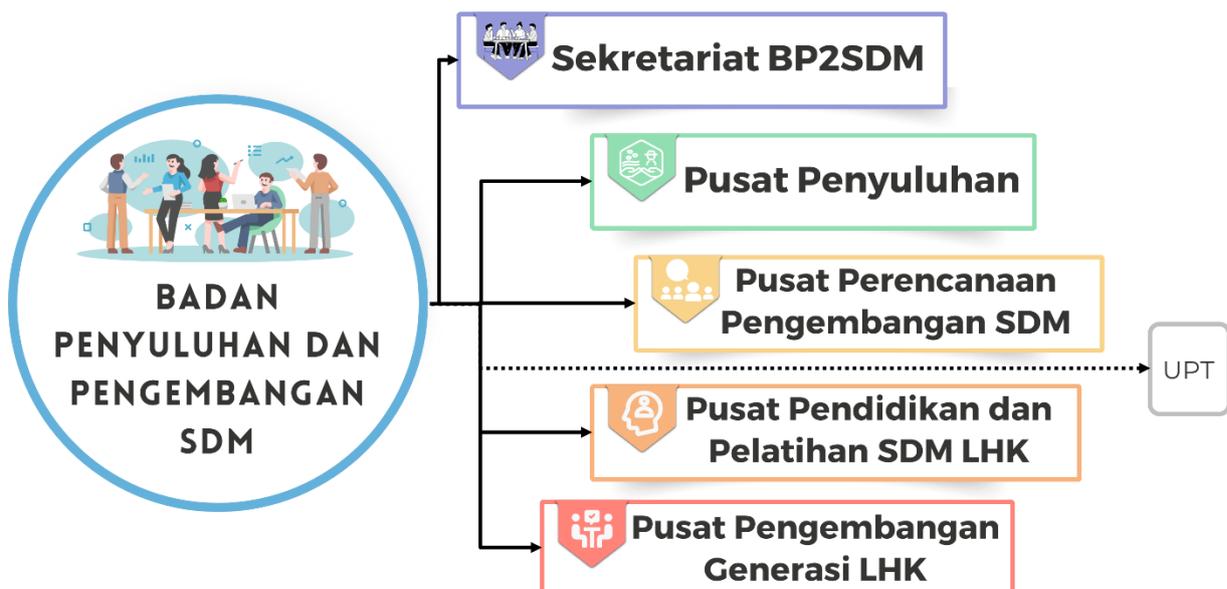


- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BP2SDM, fokus utama kegiatan yang dilaksanakan Badan P2SDM adalah penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia LHK. Pada tahun 2024 BP2SDM masih mendukung *Major Project 44-Pengelolaan Terpadu UMKM* melalui kegiatan “Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha”. Dalam rangka mendukung pencapaian Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN), Badan P2SDM mendukung pada PN1, PN3 dan PN6 melalui 11 (sebelas) kegiatan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BADAN P2SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung oleh lima unit kerja eselon II (Gambar 1). Adapun tugas dan fungsi Badan P2SDM mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

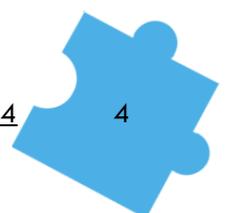


GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Badan P2SDM selain didukung oleh 5 unit eselon II juga didukung oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang terdiri dari 7 Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Rincian lokasi dan wilayah kerja masing-masing satuan kerja tercantum pada Tabel 1 berikut.

TABEL 1. UNIT KERJA PUSAT DAN UPT PADA BADAN P2SDM

No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
A. Unit Kerja Eselon II (Pusat)			
1.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	Seluruh Indonesia
3.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	Seluruh Indonesia
4.	Pusat Pengembangan Generasi LHK	Serpong	Seluruh Indonesia
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	Seluruh Indonesia
B. UPT Balai Pelatihan LHK			
1.	Balai Pelatihan LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung.
2.	Balai Pelatihan LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Pelatihan LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Pelatihan LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Pelatihan LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Pelatihan LHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
7.	Balai Pelatihan LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
C. SMK Kehutanan Negeri			
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.



1.4 SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN P2SDM

Pelaksanaan kegiatan pada Badan P2SDM didukung oleh SDM yang berasal dari unsur pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN (Tenaga Kontrak). Pada tahun 2023 (November) terdapat 1.138 orang pegawai yang tersebar pada unit kerja Eselon II (Pusat) dan UPT lingkup Badan P2SDM.



GAMBAR 2. DATA SUMBER DAYA MANUSIA BADAN P2SDM

1.5 PENGARUSUTAMAAN

Dalam rangka mempercepat pencapaian target-target pembangunan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola terhadap faktor eksternal lingkungan, terdapat empat pengarusutamaan yang menjadi kebijakan di Kementerian LHK. Badan P2SDM sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK tersebut. Keempat pengarusutamaan tersebut saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai

agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

BP2SDM melakukan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang telah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan antara lain: Fasilitasi dan pembentukan KTH Mandiri, Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya, Pembinaan dan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat, Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Pembinaan SDM yang berorientasi wirausaha kreatif lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat. Pada Tahun 2023, BP2SDM melalui Pusat Diklat SDM LHK juga melaksanakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang akan dilaksanakan secara *Massive Open Online Course* (MOOC) sebanyak 20 JP yang dapat diakses dan diikuti secara gratis oleh seluruh lapisan ASN KLHK di manapun berada.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

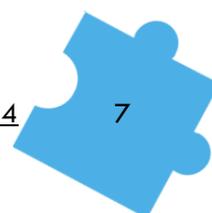
Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Dalam hal pengarusutamaan digital, Badan P2SDM selama ini telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kemudahan akses perolehan data melalui pengelolaan website, dan berbagai pengembangan aplikasi yang antara lain sebagaimana Tabel 2.

TABEL 2. SISTEM INFORMASI PADA BADAN P2SDM

No.	Sistem Informasi	Alamat	Jenis Layanan
1.	SIMP2SDM	https://simp2sdm.menlhk.go.id	Memberikan informasi dan penyediaan data penyuluhan dan pengembangan SDM
2.	SIMLUH	http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id	Menyediakan data tentang jumlah dan sebaran Penyuluh Kehutanan, KTH, Nilai Transaksi Ekonomi, Sarpras Penyuluhan dan Kelembagaan Penyuluhan di daerah secara <i>real time</i>
3.	Cyber Extention	http://cybex.bp2sdm.menlhk.go.id	Menyediakan materi penyuluhan yang dapat diakses secara online
4.	SIMRENBANG SPEKTRA	https://simrenbang.bp2sdm.menlhk.go.id	Data Dan Informasi Profil Kompetensi SDM Aparatur (Peta Kompetensi dan Rekomendasi Pengembangan Per Individu, Per Organisasi, Per Jabatan)
5.	E-Learning KLHK	http://elearning.menlhk.go.id	Untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan/diklat secara jarak jauh/online
7.	SIDIA	https://pusatpghk.bp2sdm.menlhk.go.id/adiwiyata_2023	Sistem informasi untuk sekolah-sekolah Adiwiyata

Selain Sistem Informasi yang dibangun berdasarkan fungsi data, BP2SDM beserta Satker Lingkup BP2SDM aktif mengelola website dan media sosial sebagai sarana penyebaran berita dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.



II. CAPAIAN KINERJA BP2SDM

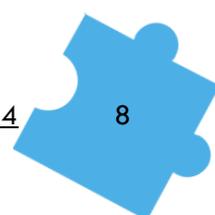


2.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Badan P2SDM pada tahun 2022 mendukung pencapaian sasaran strategis ke-4 dari empat sasaran strategis KLHK “Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing”, melalui dukungan terhadap indikator kinerja utama KLHK yaitu “Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan”; “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK”; serta “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi”. Selain itu, Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada tiga Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional yaitu: PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Badan P2SDM mendukung melalui 2 (dua) kegiatan dengan rincian output yaitu *Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha*; PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu *Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal, KTH Mandiri yang terbentuk, Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang, Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, Pengadaan Peralatan Sekolah, Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN), dan Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah*; serta PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Terdapat 2 (dua) kegiatan atau rincian output pada BP2SDM yang mendukung program prioritas ini yaitu *Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan serta Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan*.

Dalam rangka penyempurnaan arsitektur kinerja KLHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 Program pada Kementerian LHK mulai Tahun 2022 mengalami restrukturisasi menjadi 5 (lima) program dan Badan P2SDM masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Pada program ini, kegiatan BP2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM.
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Daya Saing Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Menuju Masyarakat yang Mandiri. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan;

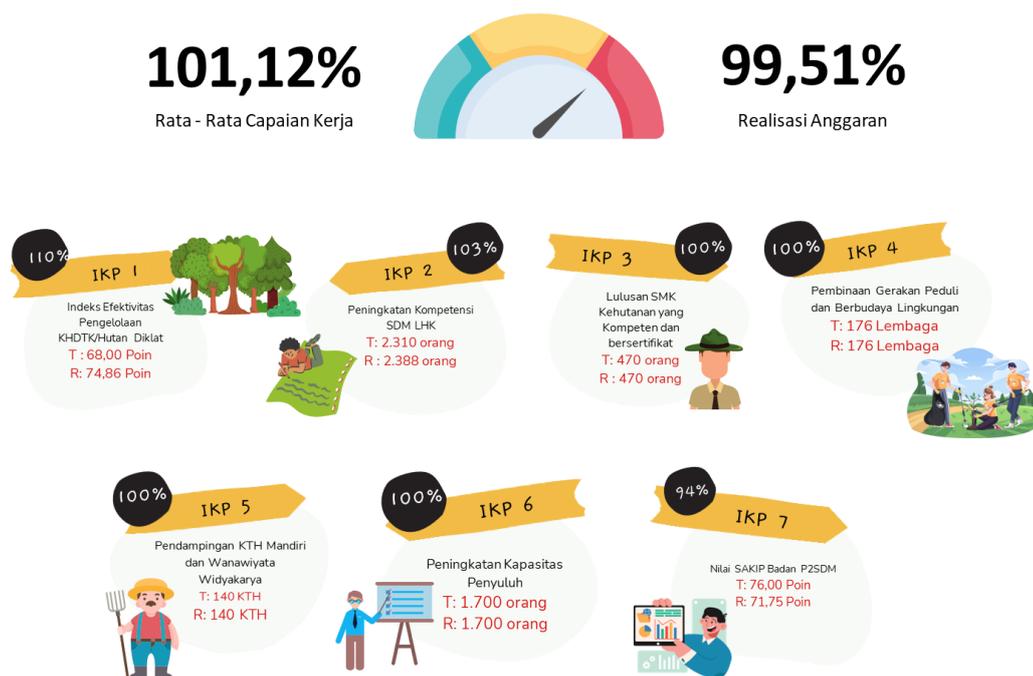


3. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM, Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK, Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan, serta Pengembangan Generasi LHK. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Untuk mendukung keberhasilan tujuan dari sasaran tersebut terdapat 7 (tujuh) target Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu:

1. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat;
2. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya;
3. Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat;
4. Jumlah Lembaga/ Komunitas serta Generasi Peduli dan/atau Berbudaya Lingkungan Hidup;
5. Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan;
6. Jumlah Penyuluh yang Ditingkatkan; serta
7. Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Adapun capaian indikator kinerja BP2SDM tahun 2022 adalah sebagai berikut.



Sumber data: Laporan Kinerja (LKj) BP2SDM Tahun 2022

GAMBAR 3. CAPAIAN IKP BADAN P2SDM TAHUN 2022

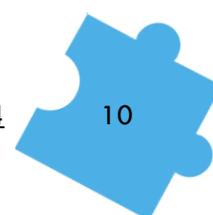
* Keterangan:

1. IKP Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
2. IKP Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
3. IKP Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.
4. IKP Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dihitung berdasarkan RO KTH Mandiri yang terbentuk dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang.

Untuk mendukung pencapaian IKP diatas, Badan P2SDM menyusun 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Penyusunan rencana kerja untuk tahun 2022 masih menggunakan kebijakan penyusunan redesain sistem perencanaan penganggaran yang mengikuti dan disesuaikan dengan klasifikasi rincian output (KRO) yang sudah ditetapkan. Pada pelaksanaan tahun 2022, terdapat kebijakan pemerintah berupa penghematan anggaran yang berasal dari *automatic adjustment*. Hal ini mengakibatkan penyesuaian target pada beberapa kegiatan. Kegiatan Badan P2SDM dijabarkan melalui 24 (dua puluh empat) rincian output kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.

TABEL 3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM TAHUN 2022

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Rincian Output (RO)	Capaian
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (76 Poin)	71,75 Poin	Layanan Umum (12 Layanan)	12 Layanan
		Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 3)	Level 4	Layanan Sarana Internal (8 Unit)	8 Unit
		Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)	1 Dokumen	Layanan Prasarana Internal (4 Unit)	4 Unit
				Layanan Perkantoran (15 Layanan)	15 Layanan
2	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (1 Layanan)	1 Layanan
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (1 Layanan)	1 Layanan
		Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (600 Orang)	666 Orang	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK (600 orang)	666 Orang
3	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK (390 Orang)	391 Orang	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan (390 Orang)	391 Orang
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (660 Orang)	670 Orang	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan (660 Orang)	670 Orang
		Lulusan Pendidikan Karyasiswa (10 Orang)	15 Orang	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK (10 Orang)	15 Orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha (660 Orang)	661 Orang	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (660 Orang)	661 Orang
		Nilai KHDTK yang dikelola (68 Poin)	74,86 Poin	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat (7 Unit)	7 Unit
4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (470 Orang)	470 Orang	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (470 Orang)	470 Orang
				Pengadaan Peralatan Sekolah (6 Paket)	6 Paket
				Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (3 Unit)	3 Unit
				Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah (5 Unit)	5 Unit

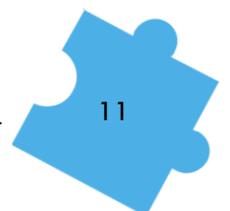


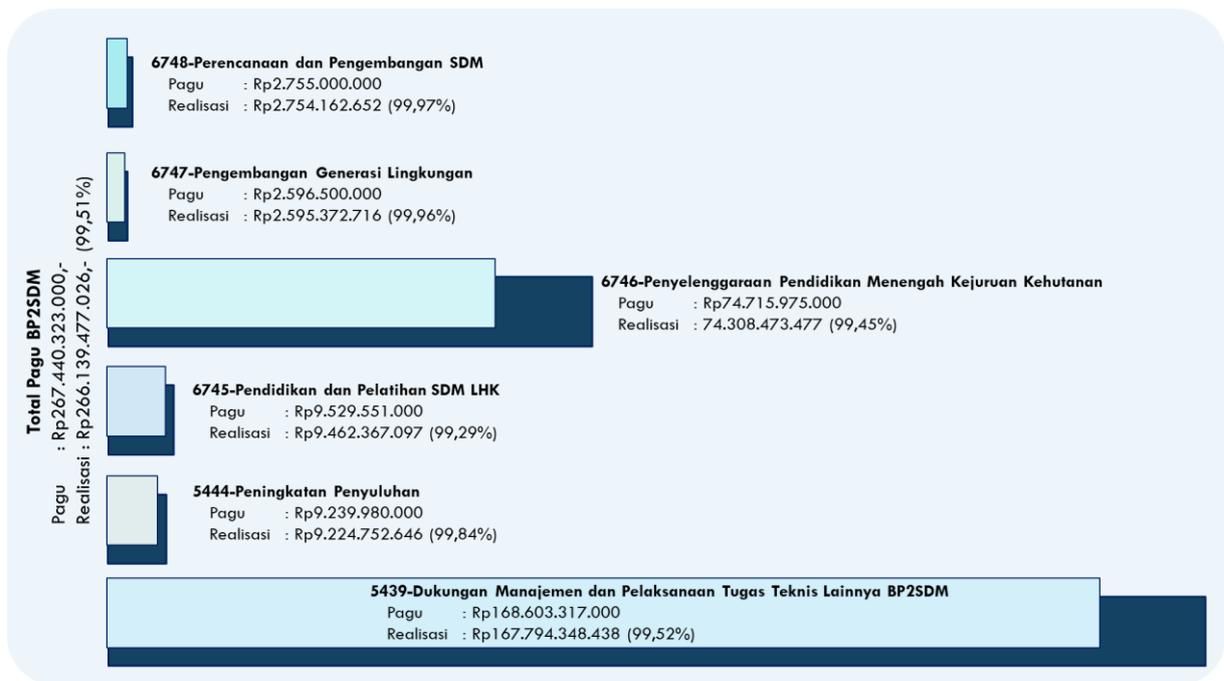
No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Rincian Output (RO)	Capaian
5	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan/atau berbudaya LHK (176 Lembaga)	176 Lembaga	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (165 Lembaga)	165 Lembaga
				Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (11 Lembaga)	11 Lembaga
		Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas (570 Orang)	570 Orang	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan (570 Orang)	570 Orang
6	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah KTH (KTH Mandiri) (90 Unit)	90 Unit	KTH Mandiri yang terbentuk (90 Kelompok Masyarakat)	90 Unit
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan (50 Unit)	50 Unit	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS yang terbentuk dan berkembang (50 Kelompok Masyarakat)	50 Unit
		Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (penyuluh handal) (1.700 Orang)	1.700 Orang	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.700 Orang)	1.700 Orang
				<i>Forest Investment Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project (FIP-II)</i> (300 Orang)	308 Orang

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pada tahun 2022 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp284.337.418.000,- yang terbagi dalam 3 Program. Namun sesuai arahan Menteri Keuangan dilakukan pencadangan anggaran atau *Automatic Adjustment (AA)* pada belanja K/L TA 2022 sebesar 5% dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19. Badan P2SDM mengalokasikan sebesar Rp10.934.730.000 untuk pencadangan anggaran tersebut.

Pada bulan Mei 2022, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran HLN *Forest Investment Program Project II (FIP-2)*, Badan P2SDM memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp1.514.386.175,- yang bersumber dari dan Hibah Luar negeri (HLN), sehingga pagu Badan P2SDM menjadi Rp285.851.804.000,-. Berdasarkan surat Menteri Keuangan, pada bulan Mei 2022, terdapat penambahan pencadangan anggaran (AA) tahap ke-2, dimana alokasi pencadangan anggaran tahap 2 untuk BP2SDM sebesar Rp5.242.726.000,-.

Pada bulan September 2022 dilakukan realokasi belanja pegawai ke belanja barang non operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pelatihan dasar CPNS 2022. Pada bulan Oktober 2022 realokasi atau penyesuaian belanja pegawai operasional yang berasal dari blokir AA sebesar Rp10.884.730.000,- ke BA BUN, sehingga Pagu BP2SDM menjadi Rp274.967.074.000,-. Selanjutnya pada akhir November 2022 dilakukan realokasi anggaran *automatic adjustment* dari anggaran BA 029 ke BA BUN. Sehingga pagu BP2SDM menjadi Rp267.440.323.000,-. Realisasi anggaran BP2SDM sampai dengan akhir tahun 2022 adalah Rp266.139.477.026,- (99,51%) dengan rincian capaian anggaran per kegiatan adalah sebagai berikut:





GAMBAR 4. REALISASI ANGGARAN BADAN P2SDM PER KEGIATAN TAHUN 2022

2.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d Oktober 2023

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa pemutakhiran dan optimalisasi kinerja melalui penyesuaian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama, dimana terdapat 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (Sasaran Program) yang diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja BP2SDM juga mengalami penyesuaian yaitu meleburnya indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan peningkatan penyuluhan yang meliputi: Indikator Kinerja Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dan Indikator Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada perubahan baru, indikator kinerja yang disebutkan pada dokumen adalah “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”.

Perubahan indikator kinerja tersebut disusun sebagai penyempurnaan muatan kinerja sebelumnya. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dengan kata lain, Indikator kinerja kelembagaan kelompok masyarakat dan indikator kinerja penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya masih menjadi kinerja di Pusat Penyuluhan. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut menjadi ukuran kinerja BP2SDM. Adapun penyesuaian Indikator Kinerja BP2SDM sesuai Revisi Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Selama pelaksanaan tahun 2023, terdapat beberapa kali penyesuaian pagu pada BP2SDM yang menyebabkan adanya penambahan jumlah target pada beberapa kegiatan. Selain itu, satuan kerja di lingkup BP2SDM juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian pada target kinerja BP2SDM Tahun 2023. Adapun target indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2023 serta capaian sampai dengan November Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 3 dan tabel 4 tersebut.

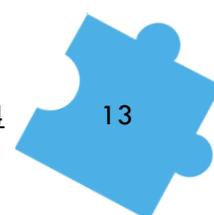
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK	Sasaran BP2SDM	Indikator Kinerja BP2SDM*	Target Awal	Target Akhir	Capaian s.d November 2023
T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,3 Triliun Rupiah	0,3 Triliun Rupiah	0,579 Triliun Rupiah
T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	2.940 Orang	6.354 Orang	5.107 Orang
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	473 Orang	472 Orang	472 Orang
		T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	69 Poin	69 Poin	74,55 Poin
		T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	247 Unit	247 Unit	247 Unit
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78 Poin	78 Poin	76,21 Poin

* Keterangan Indikator Kinerja BP2SDM:

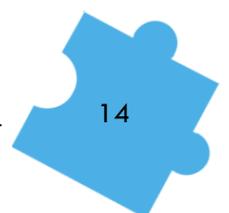
1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
3. Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian IKP diatas, disusun 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) kegiatan. Adapun capaian kegiatan berdasarkan target penyesuaian sampai dengan November 2023 adalah sebagai berikut.



TABEL 5. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Rincian Output (RO)	Capaian
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (78 Poin)	76,21 Poin	Layanan Umum (12 Layanan)	12 Layanan
		Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 3)	Level 3	Layanan Sarana Internal (8 Unit)	8 Unit
		Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)	1 Dokumen	Layanan Prasarana Internal (4 Unit)	4 Unit
				Layanan Perkantoran (15 Layanan)	15 Layanan
2	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Layanan)	5 Layanan
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Layanan)	5 Layanan
		Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (900 Orang)	356 Orang	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK (900 orang)	550 Orang
3	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK (2.549 Orang)	2.397 Orang	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan (2.549 Orang)	2.397 Orang
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (2.022 Orang)	2.028 Orang	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan (2.022 Orang)	2.028 Orang
		Lulusan Pendidikan Karyasiswa (10 Orang)	10 Orang	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK (10 Orang)	10 Orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha (883 Orang)	788 Orang	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (883 Orang)	788 Orang
		Nilai KHDTK yang dikelola (69 Poin)	74,55 Poin	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat (7 Unit)	7 Unit
4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (472 Orang)	472 Orang	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (472 Orang)	472 Orang
				Pengadaan Peralatan Sekolah (5 Paket)	5 Paket
				Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (1 Unit)	1 Unit
				Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah (4 Unit)	4 Unit
5	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan/atau berbudaya LHK (247 Lembaga)	247 Lembaga	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (230 Lembaga)	230 Lembaga
				Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (17 Lembaga)	17 Lembaga
		Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas (662 Orang)	662 Orang	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan (662 Orang)	662 Orang

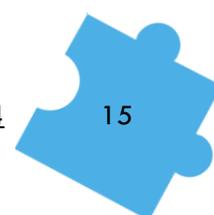


No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Rincian Output (RO)	Capaian
6	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah KTH (KTH Mandiri) (30 Unit)	30 Unit	KTH Mandiri yang terbentuk (30 Kelompok Masyarakat)	30 Kelompok Masyarakat
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan (20 Unit)	20 Unit	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS yang terbentuk dan berkembang (20 Kelompok Masyarakat)	20 Kelompok Masyarakat
		Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (penyuluh handal) (1.000 Orang)	1.000 Orang	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.000 Orang)	1.000 Orang

Selama pelaksanaan tahun 2023, terdapat beberapa kali penyesuaian pagu BP2SDM. Pada bulan Mei 2023 terdapat penambahan pagu yang berasal dari PNBPDenda Administratif Bidang Kehutanan sebesar Rp16.000.000.000,- pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sehingga pagu BP2SDM yang semula Rp296.154.950.000,- menjadi Rp312.154.950.000,-. Pada bulan Juli 2023, terdapat pengurangan pagu belanja pegawai melalui mekanisme pergeseran anggaran dari BA 029 (Bagian Anggaran Kementerian LHK) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang berasal dari belanja pegawai dengan penandaan *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp2.097.767.000,- pada Program Dukungan Manajemen yang menyebabkan pagu BP2SDM berubah menjadi Rp310.057.183.000,-.

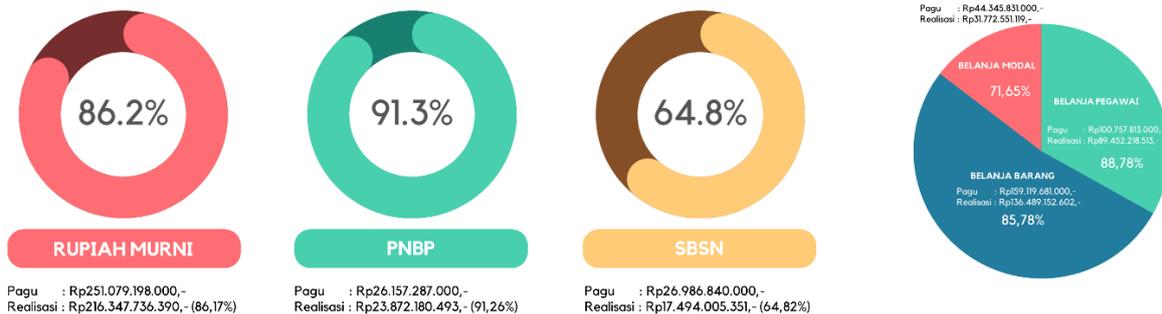
Selanjutnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Orientasi bagi PPPK lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Formasi Tahun 2022, pada bulan Agustus 2023 terdapat pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal - Biro Umum ke Badan P2SDM sebesar Rp2.296.180.000,- pada Program Dukungan Manajemen sehingga pagu BP2SDM menjadi Rp312.353.363.000,-. Pada bulan September 2023, dalam rangka relaksasi AA, BP2SDM memperoleh penambahan pagu Rupiah Murni melalui skema pergeseran anggaran dari pagu AA Inspektorat Jenderal yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Karhutla bagi Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebesar Rp2.168.333.000,- sehingga pagu BP2SDM Rp314.521.696.000,-. Pada bulan Oktober dilakukan realokasi anggaran blokir *Automatic Adjustment* (AA) Non Belanja Pegawai BP2SDM sebesar Rp10.298.371.000,- ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sehingga pagu akhir BP2SDM per Oktober 2023 adalah Rp304.223.325.000,-

Realisasi anggaran BP2SDM sampai dengan November 2023 adalah Rp257.713.922.234,- (84,71%) dengan rincian capaian anggaran sebagai berikut:



REALISASI ANGGARAN BP2SDM S.D. NOVEMBER 2023

Pagu : Rp304.223.325.000,- ; Realisasi : Rp257.713.922.234,- (84,71%)



GAMBAR 5. CAPAIAN ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA DAN JENIS BELANJA TAHUN 2023

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Tahun 2022 pada Laporan Kinerja Badan P2SDM dan hasil monitoring kinerja pada tahun 2023, terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan terus menerus sesuai amanat UU 20/2023 tentang ASN yang belum sepenuhnya dapat difasilitasi oleh Badan P2SDM.
2. Masih diperlukannya penguatan portofolio lulusan SMK Kehutanan Negeri agar dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri sektor LHK .
4. Pencapaian kinerja kegiatan pembinaan lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah masih jauh dari kebutuhan jumlah sekolah yang perlu ditingkatkan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BPS, terdapat 399.376 unit sekolah di pada tahun ajaran 2022/2023, sedangkan alokasi anggaran dan target kinerja per tahun rata-rata di bawah 1.000 unit. 90% dari ± 21 ribu KTH masih dalam katagori kelas pemula dengan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) masih rendah.
5. Masih diperlukannya penguatan SDM dalam implemmentasi UUCK baik kualitas dan kuantitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024 serta meminimalkan gap capaian target kegiatan Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan alokasi anggaran di tahun 2024 untuk mendukung peningkatan target pada kegiatan pelatihan yang masih memiliki gap capaian tinggi sehingga dapat berjalan lebih optimal, khususnya pada target Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha.
2. Memaksimalkan pelatihan dengan metode *Massive Open Online Courses* (MOOC) untuk menjangkau target peserta pelatihan yang lebih luas dan berdampak pada efisiensi sumberdaya.

3. Mengintegrasikan materi Lingkungan Hidup dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri dan penetapan kegiatan magang/ pengabdian bagi lulusan SMK Kehutanan Negeri untuk meningkatkan spektrum lulusan dan meningkatkan ketrampilan berdasarkan pengalaman magang di UPT Kementerian LHK.
4. Penguatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Kerja dalam pengembangan bursa kerja untuk lulusan SMK Kehutanan Negeri.
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga/komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup dengan menggunakan mekanisme yang berbeda sehingga dapat lebih efisien dan mengalokasikan peningkatan anggaran untuk mendukung inovasi tersebut.
6. Peningkatan kapasitas Penyuluh pendamping KTH dalam meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH.
7. Penguatan koordinasi dan Kerjasama baik dengan Eselon I lingkup Kementerian LHK, Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengembangan Kompetensi SDM LHK.



III. RENCANA KERJA TAHUN 2024



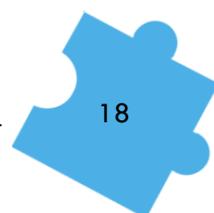
Mengacu pada visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI serta rumusan visi KLHK, sebagaimana tercantum dalam Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 (revisi), visi Badan P2SDM dalam mendukung hal tersebut adalah “Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif, Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi Badan P2SDM, misi Badan P2SDM yang disusun dengan mengacu pada misi Presiden ke-4 serta misi KLHK adalah:

1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu;
2. Merevitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan;
3. Merevitalisasi dan melakukan pengembangan sistem pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengembangkan pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas);
5. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Mewujudkan generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima di BP2SDM.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Mengacu pada Renstra BP2SDM 2020-2024 (revisi), berdasarkan optimalisasi kinerja Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Badan P2SDM mendukung 3 (tiga) Tujuan dan sasaran strategis KLHK yaitu:

- 1) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan melalui Indikator Kinerja Program “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)” (T2.S2.1)
- 2) Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas melalui Indikator Kinerja Program “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK” (T4.S1.1)
- 3) Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien melalui Indikator Kinerja Program “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi” (T4.S2.1)

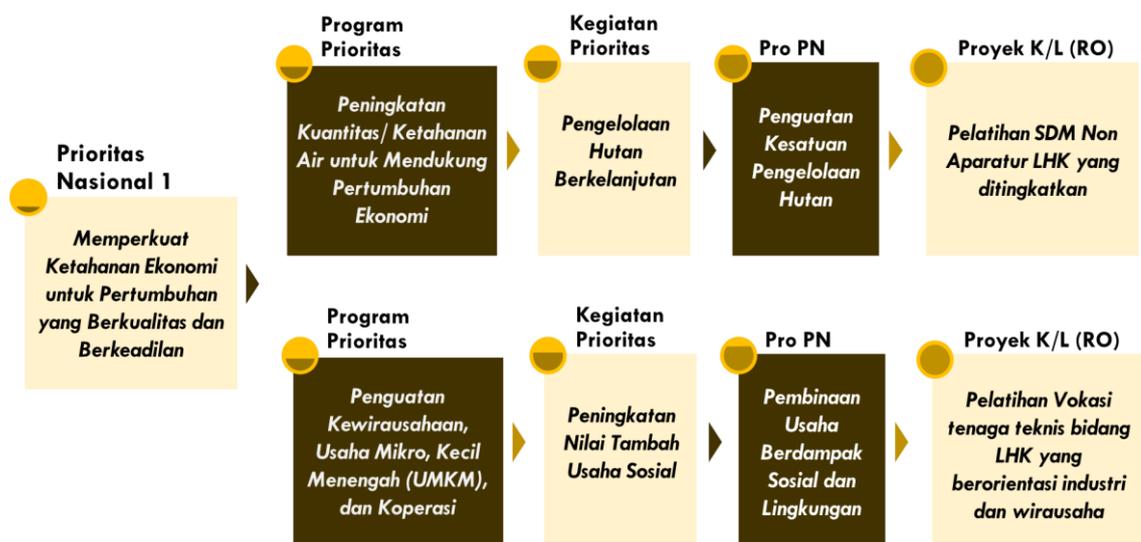


Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan (AP / Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. KLHK sebagai salah satu pelaksana program pemerintah mendukung terhadap 4 (empat) Prioritas Nasional yaitu : (PN1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; (PN6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tahun 2024, Badan P2SDM masih mendukung Pencapaian pada tiga Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN) serta 1 (satu) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*) yaitu:

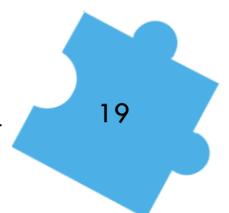
1. AP/PN-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 1 melalui kegiatan ***Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha***. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan kapasitas berupa pelatihan yang diberikan kepada SDM Non Aparatur yang langsung menangani pengelolaan hutan di tingkat tapak. Termasuk dalam kegiatan ini yaitu tenaga teknis bidang LHK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam orientasi industri dan pengembangan wirausaha. Kegiatan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha juga mendukung *Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM*.

Sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan ini diarahkan untuk dapat mendukung semua kegiatan Kementerian LHK sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing UKE I seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL; serta BRGM.



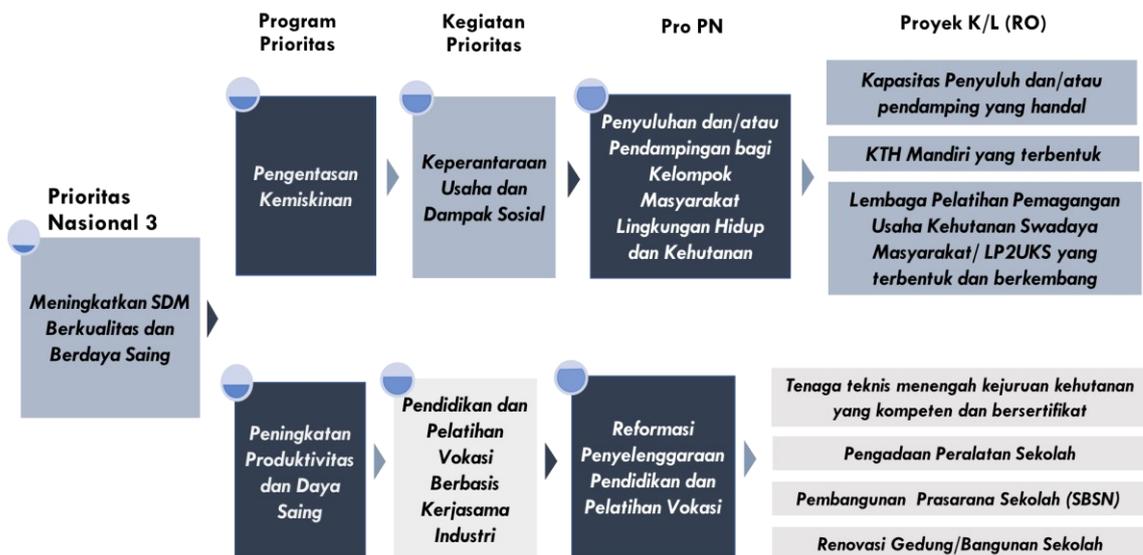
GAMBAR 6. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 1



2. AP/PN-3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu pendampingan dan pengembangan bagi penyuluh dan Kelompok Tani Hutan (KTH) serta Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Kegiatan pendampingan dan pengembangan bagi penyuluh dan Kelompok Tani Hutan (KTH) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing KTH melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kelompok Tani Hutan selain menjadi media pembelajaran masyarakat, wadah kerjasama dan gotong royong dalam mengelola dan menjaga kelestarian alam juga menjadi pengembangan usaha komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, melalui pembinaan KTH, BP2SDM sekaligus mendukung kinerja UKE 1 lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL; serta BRGM.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan diarahkan untuk menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki kompetensi dan siap bekerja pada industri kehutanan maupun dunia usaha serta dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat tapak terutama KTH dan Kelompok Perhutanan Sosial dengan tujuan akhir meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Paket keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK ini dapat mendukung kegiatan UKE I lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; serta Ditjen PHLHK. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada tabel berikut.



GAMBAR 7. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 3

3. PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Terdapat 2 (dua) kegiatan atau rincian output pada BP2SDM yang mendukung program prioritas ini yaitu “Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan” serta “Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan”. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, warga sekolah ataupun anggota lembaga/komunitas dapat lebih meningkat kesadaran dan kapasitasnya dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup. Kegiatan ini khususnya mendukung pula kinerja kegiatan UKE I lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; serta Ditjen PPKL.



GAMBAR 8. DUKUNGAN BP2SDM PADA AP/PN 6

3.1 PETA SASARAN PROGRAM

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis BP2SDM 2020-2024 (Revisi), Kementerian LHK memiliki 5 (lima) program sebagaimana Gambar 10. Adapun Badan P2SDM mendukung melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatkan SDM KLHK yang Berkualitas. Program ini diarahkan untuk pengembangan kompetensi SDM LHK melalui sertifikasi dan pelatihan vokasi untuk mendukung industri kehutanan dan wirausaha kreatif bidang LHK; Peningkatan kualitas pendidikan formal (SMK Kehutanan) serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah termasuk di dalamnya untuk Pembangunan Kampus II SMKKN Manokwari di Sorong; Penyuluhan dan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan dalam rangka meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan; serta Pembinaan kepada lembaga maupun kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Indikator Kinerja Kementerian LHK yang didukung BP2SDM pada program ini adalah Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK dengan target 80 poin.

2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan. Arah dukungan Badan P2SDM pada program ini adalah melalui peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan dengan target pada tahun 2024 adalah 0,5 Triliun Rupiah. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dalam rangka mendukung perhitungan nilai transaksi ekonomi KTH tersebut dilakukan pendampingan terhadap penyuluh kehutanan untuk melakukan pencatatan nilai transaksi ekonomi yang terjadi pada setiap KTH;

3. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan nilai kinerja reformasi birokrasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja KLHK. Pada program ini, kegiatan BP2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM melalui pencapaian Nilai SAKIP BP2SDM dengan target 80 Poin.

PROGRAM KEMENTERIAN LHK



GAMBAR 9. DUKUNGAN BP2SDM DALAM PROGRAM KEMENTERIAN LHK

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM, disusun Peta Cascading Arsitektur Kinerja untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK

dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah disusun Badan P2SDM. Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan nomor S.429/ROCAN/RPA/REN.0/1/2023 tanggal 1 Desember 2023 dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja KLHK, terdapat penambahan indikator kinerja bagi setiap Sekretariat UKE I Kementerian LHK yaitu “Nilai Kinerja Anggaran” setiap unit kerja. Hal ini sebagai upaya Kementerian LHK dalam mendukung internalisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ke dalam indikator kinerja pada dokumen perencanaan kinerja, mulai tingkat Kementerian sampai pada unit kerja pengelola anggaran terkecil. Adapun secara rinci, *Cascading* Arsitektur Kinerja Badan P2SDM dapat dilihat pada lampiran dokumen.



Gambar 10. *Cascading* Peta Arsitektur Badan P2SDM

3.2 INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2024

Sebagaimana dokumen Revisi Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (Sasaran Program) serta diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK. Adapun BP2SDM mendukung 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Program BP2SDM yaitu:



TABEL 6. INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK	Sasaran BP2SDM	Indikator Kinerja BP2SDM*
T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (0,5 Triliun Rupiah)
T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya (14.915 Orang)
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (491 Orang)
		T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (70 Poin)
		T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup (3.368 Unit)
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (80 Poin)
		T4.S2.1.1.2 Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (97,25 Poin)

* Keterangan Indikator Kinerja BP2SDM:

1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
3. Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

• Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

Selama ini indikator dari keberhasilan kegiatan pendampingan kelompok masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan masih sulit diukur, oleh karena banyaknya variabel dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh. Hal ini menyebabkan penetapan *corrective action* dan perbaikan-perbaikan kebijakan penyuluhan dan pendampingan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sulit ditempuh. Sasaran utama kegiatan penyuluhan dan pendampingan yaitu meningkatkan daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini, yang dimaksud pelaku utama dan pelaku usaha adalah Kelompok Tani Hutan (KTH). Keberhasilan pembangunan kehutanan salah satunya ditandai dengan kelestarian hutan

dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kesejahteraan yang digambarkan sebagai kemampuan ekonomi yang ditandai dengan naiknya pendapatan, daya beli, tingkat pendidikan dan kesehatan. Untuk mengetahui naiknya kemampuan ekonomi masyarakat di suatu wilayah biasanya diukur dengan nilai transaksi ekonomi yang berputar di wilayah tersebut. Secara umum, transaksi ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi maupun individu yang berdampak pada perubahan atas aset atau finansial yang dimilikinya. Indikator ini juga untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku (T2.S2.1))”.

Nilai Transaksi Ekonomi KTH adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan KTH dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan pendamping KTH diharapkan dapat meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH yang selanjutnya membawa dampak bagi kesejahteraan kelompok masyarakat hutan. Data Nilai transaksi ekonomi juga dapat digunakan sebagai data perkiraan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjadi masukan dalam kebijakan penyuluhan dan pendampingan. Penetapan nilai transaksi ekonomi sebagai indikator dalam dokumen perencanaan sekaligus dapat memotivasi Penyuluh Kehutanan pendamping dan KTH untuk dapat terus aktif mengembangkan usaha produktifnya.

Penghitungan NTE dilakukan melalui pendekatan perolehan omzet usaha (produk barang dan/atau jasa) KTH. Perhitungan NTE dilakukan dalam periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember atau 1 (satu) tahun kalender. Data terkait Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan tersebut akan dikumpulkan, diolah dan diinput oleh penyuluh kehutanan pendamping ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH). Naiknya omzet secara berkesinambungan akan menjadikan naiknya pendapatan yang di terima oleh petani yang selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraannya.

Penghitungan NTE tidak hanya dilakukan pada KTH namun juga dilakukan pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yaitu KTH yang telah memperoleh izin perhutanan sosial. Perhitungan NTE KTH dilakukan oleh Badan P2SDM melalui Pusat Penyuluhan. Adapun, perhitungan NTE KUPS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL). Untuk menghindari adanya *overlapping* data NTE KTH dan NTE KUPS, maka penyuluh pendamping memastikan bahwa data NTE yang diinput tidak sama berdasarkan jenis komoditasnya.

- **JUMLAH SDM LHK YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA**

Kinerja peningkatan kompetensi SDM LHK terdiri dari pengembangan kompetensi SDM LHK melalui berbagai kegiatan diantaranya pelatihan SDM Aparatur, Pelatihan SDM Non Aparatur, Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri serta pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi. Dalam rangka mengejar gap capaian target kegiatan Renstra

BP2SDM Tahun 2020-2024, khususnya pada kegiatan pelatihan, BP2SDM akan memfokuskan alokasi anggaran di tahun 2024 untuk mendukung peningkatan target pada kegiatan pelatihan yang masih memiliki gap capaian tinggi yaitu target Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha.

Pada tahun 2024 diharapkan kegiatan pengembangan kompetensi dapat memaksimalkan penggunaan metode daring dalam pelaksanaan kegiatan, seperti menggunakan metode *e-learning* atau *blended learning* dalam pelatihan dan pembinaan teknis sehingga target peserta dapat lebih banyak dan dapat lebih mengefisienkan waktu pelaksanaan.

Penguatan kerjasama juga perlu lebih diintensifkan oleh setiap Satker lingkup Badan P2SDM. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM serta pelaksanaan uji kompetensi SDM yang dilaksanakan dari kolaborasi Badan P2SDM dengan stakeholder menjadi output yang dihitung sebagai capaian kinerja. Hal ini menjadi bagian dari peran Badan P2SDM dalam mensinergikan pihak-pihak terkait dalam pengembangan SDM LHK.

Pelatihan SDM Aparatur LHK, SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

Peningkatan kapasitas SDM bidang LHK dilakukan melalui pelatihan. Pelatihan Peningkatan kapasitas diberikan kepada SDM Aparatur LHK (ASN), pelatihan keterampilan bagi SDM Non Aparatur LHK atau SDM LHK di tingkat tapak maupun Masyarakat sekitar hutan. Selain itu dilakukan pelatihan vokasi bagi tenaga teknis bidang LHK, dimana jenis pelatihan yang diberikan adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang usaha kehutanan.

Mulai tahun 2020, Badan P2SDM telah memanfaatkan *Learning Management system* (LMS) sebagai terobosan dalam pelaksanaan pelatihan secara online dalam rangka memenuhi kebutuhan pelatihan SDM di masa pandemi. Selanjutnya, pelaksanaan pelatihan kemudian lebih diarahkan untuk dilaksanakan secara daring (online) atau menggunakan metode *blended learning* yang mengkombinasikan pelatihan secara daring dan luring. Pada tahun 2023, Badan P2SDM mengembangkan metode *Massive Open Online Courses* (MOOC) pada Pelatihan PUG untuk dapat menjangkau target peserta pelatihan yang lebih luas lagi dan berdampak pada efisiensi sumberdaya. Kedepan, pada tahun 2024, pelatihan dengan metode MOOC perlu lebih ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan terus menerus sesuai amanat UU 20/2023 tentang ASN.

Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM

Dalam rangka memenuhi Sumber Daya Manusia bidang LHK yang kompeten, dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Kegiatan uji kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pejabat fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu : Polisi Kehutanan (POLHUT),

Penyuluh Kehutanan (PK), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Pengawas Lingkungan Hidup (PLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) dan Non ASN.

Kegiatan uji kompetensi juga diharapkan dapat mengadopsi metode pelaksanaan yang lebih efektif dan dapat menjangkau peserta secara lebih luas lagi baik melalui efisiensi metode maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah daerah.

- **JUMLAH LULUSAN SMK KEHUTANAN YANG KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT**

Badan P2SDM menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan yang tersebar di 5 (lima) lokasi yaitu Jawa Barat (SMKKN Kadipaten), Kalimantan Timur (SMKKN Samarinda), Riau (SMKKN Pekanbaru), Sulawesi Selatan (SMKKN Makassar) dan Papua (SMKKN Manokwari) guna memenuhi kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan yang handal dan profesional. Lulusan SMK Kehutanan ini sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengisi kebutuhan tenaga di sektor pemerintah, tetapi juga di dunia usaha (BUMN, swasta).

Penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan menggunakan pola *boarding school*, sehingga siswa mendapat pembinaan penuh dari sekolah selain aspek kemampuan teknis kehutanan, juga pembinaan mental dan disiplin. Melalui pelaksanaan pendidikan ini diharapkan lulusannya menjadi tenaga kerja yang kompeten dan tangguh bekerja di lapangan.

Paket Keahlian dan Kompetensi yang dihasilkan oleh lulusan SMKKN yaitu: Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH) “Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar”; Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH) “Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS”; Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRHH) “Kompetensi Pembuat bibit generatif”; dan Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH) “Kompetensi Pemanduan Wisata Alam”.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan SMK Kehutanan dilakukan pengembangan metode ajar, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, pengembangan profesi bagi guru SMK Kehutanan maupun penyusunan strategis dan sinergitas pengelolaan SMKKN. Beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan ke depan adalah integrasi materi lingkungan hidup pada kurikulum pendidikan menengah kejuruan kehutanan di SMK Kehutanan Negeri. Hal ini bertujuan untuk memperluas spektrum lulusan SMK Kehutanan. Dengan demikian, Lulusan SMK Kehutanan nantinya tidak hanya dapat bekerja di sektor kehutanan, tetapi juga dapat bekerja di sektor lingkungan hidup. Kebijakan kedua yaitu adanya penetapan magang/ pengabdian bagi lulusan SMK Kehutanan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK guna memberikan pengalaman bekerja bagi lulusan. Pada tahun 2024 juga akan mulai diberlakukan pemberian sanksi / denda bagi siswa yang melakukan pengunduran diri sebelum menyelesaikan pembelajaran di SMKKN.

- **INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KHDTK DIKLAT KEHUTANAN**

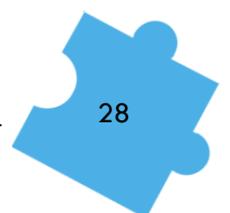
KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian, pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Badan P2SDM yang memiliki fungsi kegiatan pendidikan dan pelatihan juga melakukan pengelolaan terhadap KHDTK hutan diklat.

KHDTK hutan diklat merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat selain untuk kegiatan praktek peserta diklat, namun juga dimanfaatkan sebagai lokasi praktek siswa SMK Kehutanan dapat lebih terfokus pada suatu kawasan hutan dengan pengelolaan yang baik tanpa merubah fungsi hutan tersebut.

Sejak tahun 2020, Badan P2SDM melakukan penilaian terhadap Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan. Penilaian pengelolaan KHDTK mengacu pada PermenLHK nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.6/P2SDM/SET.11/DIK.0/12/2022 tentang Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Indeks Pengelolaan KHDTK akan dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu Pemenuhan Peruntukan, Efektifitas Pengelolaan serta Kontribusi terhadap Pengelolaan Hutan. Adapun aspek yang dilakukan penilaian terdiri dari aspek perencanaan (15%), pelaksanaan kegiatan (30%), kerja sama pengelolaan (10%), pemanfaatan hutan pada areal KHDTK Diklat Kehutanan (30%), pembangunan sarpras pendukung (10%), dan pelaporan pengelolaan KHDTK (5%).

- **JUMLAH LEMBAGA/ KOMUNITAS SERTA GENERASI PEDULI DAN/ATAU BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam rangka membentuk generasi yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup, diperlukan peran aktif Lembaga masyarakat dan komunitas dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan nyata dalam aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya Badan P2SDM dalam meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematis, terstruktur khususnya pada lembaga/organisasi/komunitas masyarakat dan sekolah yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan dilakukan melalui pembinaan gerakan bagi masyarakat untuk mendukung atau mewujudkan gerakan lembaga masyarakat dan komunitas peduli lingkungan hidup dan kehutanan serta masyarakat; dan Pembinaan atau fasilitasi kepada sekolah dalam menerapkan gerakan peduli dan/atau berbudaya lingkungan sekolah (GPBLHS) termasuk pemberian apresiasi serta publikasi pelaksanaan gerakan dan hasilnya. Pada tahun 2024 akan dilakukan pembinaan secara masif kepada sekolah yang akan mengajukan diri menjadi sekolah adiwiyata. Sosialisasi dilakukan secara bertahap per regional dengan didampingi oleh Penyuluh Lingkungan Hidup. Selain itu, penilaian sekolah adiwiyata dilakukan melalui aplikasi untuk lebih mengefektifkan waktu penilaian.



- **NILAI SAKIP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpelayanan prima, diperlukan peningkatan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah dengan penguatan akuntabilitas kinerja kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jendral KLHK untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP Badan P2SDM. Selain evaluasi terhadap nilai SAKIP, dilakukan evaluasi terhadap level maturitas SPIP pada Badan P2SDM serta penyusunan laporan keuangan pada Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel. Penanggung jawab Indikator ini adalah Sekretariat Badan P2SDM, akan tetapi setiap satuan kerja di lingkup BP2SDM juga akan melakukan penilaian mandiri terhadap SAKIP di unit kerjanya untuk mendukung pencapaian nilai SAKIP BP2SDM yang telah ditargetkan.

- **NILAI KINERJA ANGGARAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian LHK, penilaian Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penjumlahan dari 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran (Evaluasi Kinerja Anggaran/EKA) pada aplikasi SMART dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA) pada aplikasi OMSPAN.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan instrumen monev kinerja anggaran yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 8 indikator kinerja yang digunakan dalam menghitung IKPA yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output.

Penanggung jawab Indikator ini adalah Sekretariat Badan P2SDM, akan tetapi setiap satuan kerja di lingkup BP2SDM juga akan melakukan penilaian mandiri terhadap SAKIP di unit kerjanya untuk mendukung pencapaian nilai SAKIP BP2SDM yang telah ditargetkan.

Pada tahun 2024, sebagian anggaran akan diprioritaskan untuk Anggaran pendidikan; mempercepat penyelesaian capaian atau meminimalkan gap capaian target kegiatan Renstra Badan P2SDM melalui pelatihan vokasi tenaga teknis yang berorientasi industri dan wirausaha dan Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta memprioritaskan alokasi anggaran yang mendukung Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional / PN) seperti peningkatan kapasitas KTH serta penyuluh dan/atau

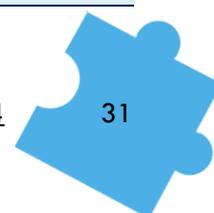
pendamping. Hal ini menjadi salah satu alasan terdapat RO yang memiliki target yang meningkat secara signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Sebagaimana kebijakan penyusunan redesain sistem perencanaan penganggaran, indikator kinerja BP2SDM kemudian dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) serta didetailkan melalui klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) yang sudah ditetapkan. IKK dan RO Badan P2SDM telah disusun secara relevan untuk mendukung keberhasilan tercapainya setiap kegiatan dan sasaran. Secara lebih terperinci IKK, KRO dan RO Badan P2SDM sebagaimana Tabel 7 berikut.

TABEL 7. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM

<i>Kegiatan</i>	<i>Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</i>	<i>Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)</i>
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
6745- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Aparatur LHK (4.335 orang) - T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (1.240 orang) - T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (7.840 orang) - T4.S1.1.1.1.1.4 Lulus Pendidikan Karya Siswa (10 orang)	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan (4.335 Orang)
		Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan (1.240 Orang)
		Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha (7.840 Orang)
		Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK (10 Orang)
	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.1.3.1 Nilai KHDTK yang Dikelola (70 Poin)	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat (7 Unit)
		Layanan Pengelolaan KHDTK (1 Layanan)
6746- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat IKK : - T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (491 Orang)	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (491 Orang)
		Layanan Pembinaan SMK Kehutanan (1 Layanan)
		Pengadaan Peralatan Sekolah (5 Paket)
		Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (1 Unit)
		Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah (4 Unit)
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (RM) (1 Unit)
6747- Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat dan Komunitas Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan (3.368 Lembaga)	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (3.350 Lembaga)
		Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan (18 Lembaga)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)
	T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan IKK : - T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas (720 Orang)	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan (720 Orang)
6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK IKK : - T4.S1.1.1.1.2.1 Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (1.500 Orang) - T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan) - T4.S1.1.1.1.2.3 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK (1.500 orang)
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Dokumen)
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Dokumen)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN		
5444-Peningkatan Penyuluhan	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat IKK : - T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri) (100 Unit) - T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (50 Unit)	KTH Mandiri (100 Kelompok Masyarakat)
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) (50 Kelompok Masyarakat)
	T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya kapasitas Penyuluh IKK : - T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (1.000 Orang)	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.000 Orang)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
5439-Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM	T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM IKK : - T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (80 Poin) - T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 4) - T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen) - T4.S2.1.1.1.7.4 Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (97,25 Poin)	Layanan Umum (12 Layanan)
		Layanan Sarana Internal (11 Paket)
		Layanan Prasarana Internal (3 Paket)
		Layanan Perkantoran (15 Layanan)



3.3 NILAI PENGELOLAAN KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi merupakan salah satu bentuk upaya perwujudan pembangunan manajemen berbasis kinerja. Kinerja organisasi yang diselaraskan dari tingkat organisasi hingga individu, mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Pemberian penghargaan dan sanksi tingkat organisasi menjadi pemicu untuk meningkatkan disiplin dan motivasi dalam mencapai kinerja yang optimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian LHK, pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada entitas Satker termasuk di lingkup Badan P2SDM berdasarkan Nilai Pengelolaan Kinerja (NPK) yang terdiri atas komponen nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan bobot 50% dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan bobot 50%. Pada penilaian Kinerja Anggaran (NKA), nilai tersebut merupakan penjumlahan dari 50% nilai kinerja atas perencanaan anggaran atau (Evaluasi Kinerja Anggaran/EKA) dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA).

Nilai Pengelolaan Kinerja dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut:

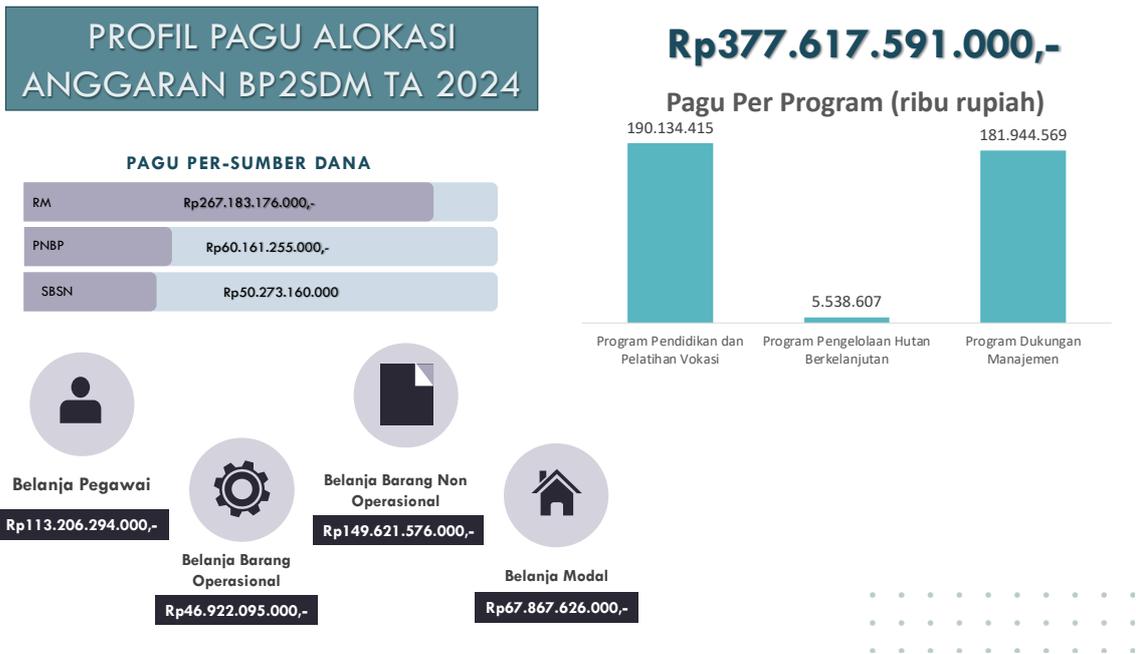
- a. Nilai pengelolaan kinerja lebih dari 90 dikategorikan sangat baik;
- b. Nilai pengelolaan kinerja lebih dari 80 sampai dengan 90 dikategorikan baik;
- c. Nilai pengelolaan kinerja lebih dari 60 sampai dengan 80 dikategorikan cukup;
- d. Nilai pengelolaan kinerja lebih dari 50 sampai dengan 60 dikategorikan kurang;
- e. Nilai pengelolaan kinerja sampai dengan 50 dikategorikan sangat kurang.

Pada tingkat Satker, pemberian apresiasi atas penilaian kinerja terhadap 3 Satker terbaik berupa penghargaan dalam bentuk piagam/trofi penghargaan dan publikasi pada media yang dikelola oleh Badan P2SDM. Sedangkan pengenaan sanksi atas penilaian kinerja terhadap 3 satker dengan nilai terendah berupa teguran pembinaan tertulis dan publikasi pada media yang dikelola oleh Badan P2SDM.

3.4 ALOKASI PENDANAAN BADAN P2SDM TAHUN 2024

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tahun 2024 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp377.617.591.000,- yang terbagi dalam 3 Program dengan rincian:

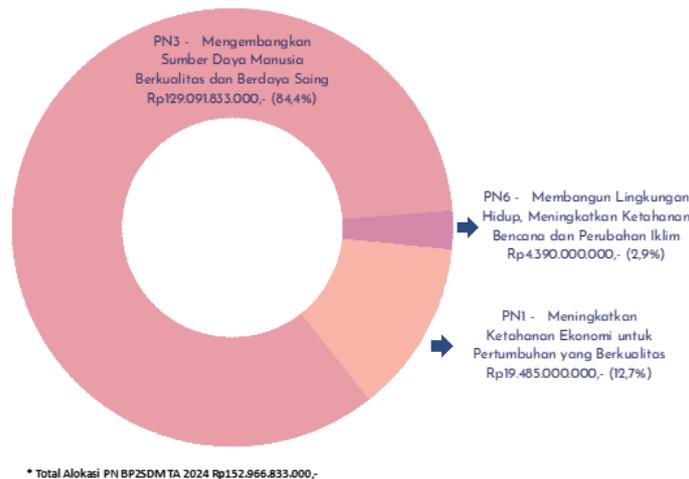
1. Program Dukungan Manajemen Rp181.944.569.000,-
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp5.538.607.000,-
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp190.134.415.000,-



GAMBAR 11. RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BP2SDM TAHUN 2024

Pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi termasuk di dalamnya alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp126.273.160.000,-. Selain itu di dalam anggaran pendidikan tersebut juga terdapat alokasi untuk proyek pendanaan SBSN sebesar Rp50.273.160.000,-. Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp113.206.294.000,-; belanja barang Operasional Rp46.922.095.000,-; dan belanja barang Non Operasional Rp217.489.202.000,- (Gambar 12). Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana yaitu RM sebesar Rp267.183.176.000,-; PNBP sebesar Rp60.161.255.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp50.273.160.000,-.

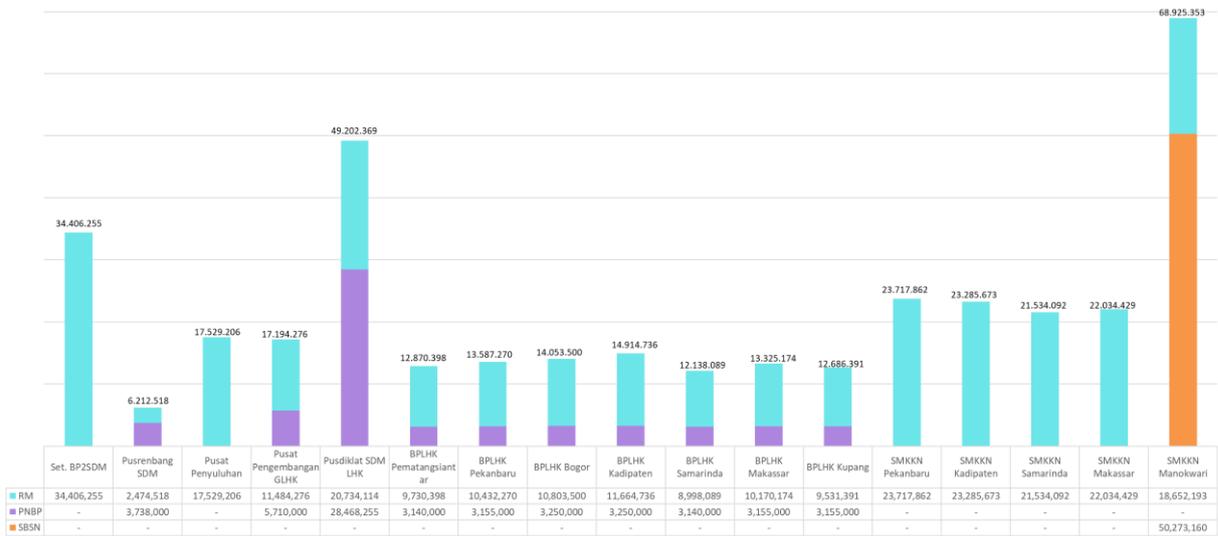
Alokasi anggaran BP2SDM pada tahun 2024 yang khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional dimaksud adalah sebesar Rp152.966.833.000,-. Nilai ini meningkat dibandingkan alokasi tahun 2023. Secara rinci, dukungan alokasi anggaran Badan P2SDM terhadap Prioritas Nasional 2024 tercantum pada Tabel 4 berikut.



GAMBAR 12. ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL BP2SDM TA 2024

Distribusi alokasi anggaran per satker pusat dan UPT lingkup Badan P2SDM dapat dilihat pada Gambar 13 berikut. Sumber dana SBSN sebesar Rp50.273.160.000,- berada pada satker SMKKN Manokwari, sehingga secara total pagu terlihat bahwa SMMKN Manokwari memiliki pagu terbesar dibandingkan satker lain.

Alokasi Anggaran Per Satker lingkup BP2SDM (xRp1.000)



GAMBAR 13. ALOKASI ANGGARAN PER SATUAN KERJA PER SUMBER DANA



IV. PENUTUP



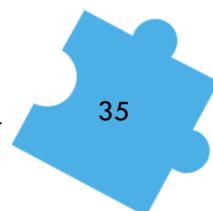
Penyusunan rencana program dan kegiatan BP2SDM Tahun 2024 merupakan upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kebijakan yang tepat dan integratif sangat dibutuhkan guna percepatan pencapaian target, oleh karena itu penyesuaian yang cepat oleh setiap satker Badan P2SDM terhadap kebijakan-kebijakan baru yang terus berkembang dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan.

Badan P2SDM KLHK menyusun rencana kerja dan kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional. Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024 (revisi) serta kebijakan perencanaan Kementerian LHK Tahun 2024 yang telah disusun. Dokumen perencanaan ini memuat rencana kegiatan Badan P2SDM Tahun 2024 untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Badan P2SDM.

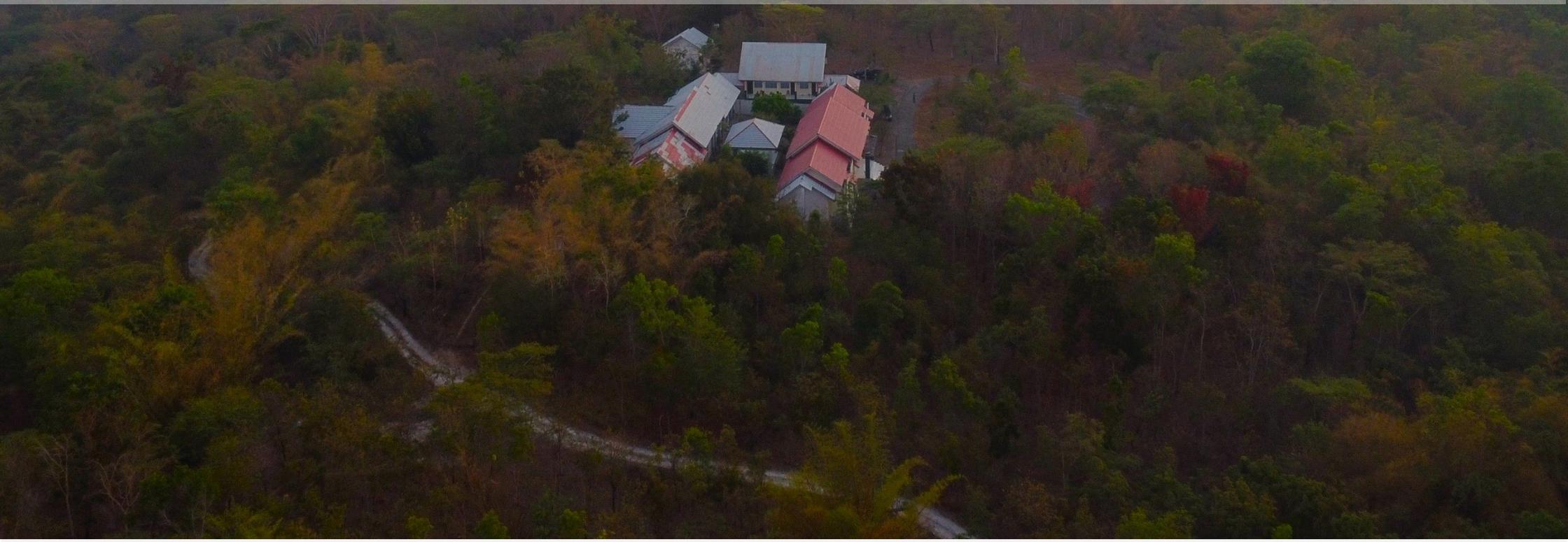
Sesuai dengan tupoksi Badan P2SDM, fokus pada penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, tidak hanya kepada Aparatur Sipil Negara tetapi juga SDM Non Aparatur atau masyarakat yang bekerja/berperan dalam pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam mewujudkan pencapaian sesuai yang diharapkan, setiap Kepala Satker agar dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, serta terus mengawal pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu diperlukan dukungan dari seluruh elemen pelaksana kegiatan Badan P2SDM untuk dapat bekerjasama secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

=====



V. LAMPIRAN



Matriks Cascading Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Sasaran Strategis KLHK: T2.S2 Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK: T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)

Indikator Kinerja BP2SDM : T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (0,5 Triliyun Rupiah)

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (SP)	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM BP2SDM	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	PAGU ALOKASI ANGGARAN		UKE II
						TARGET	ALOKASI (Ribu Rupiah)	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan SP: T2.S2 Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan IOP: T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan IK BP2SDM: T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	5444-Peningkatan Penyuluhan SK: 1. Meningkatnya Kapasitas Penyuluh 2. Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	1. Jumlah KTH (KTH Mandiri) (100 Unit) 2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (50 Unit) 3. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (1.000 Orang)	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri yang terbentuk	100 Kelompok Masyarakat	1.600.000	Pusat Penyuluhan
					002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	50 Kelompok Masyarakat	1.538.607	
				QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	1.000 Orang	2.400.000	
TOTAL							5.538.607	

Sasaran Strategis KLHK: T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK: T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK

Indikator Kinerja BP2SDM : - T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya (14.915 Orang)

- **T4.S1.1.1.2 Jumlah Jumlah Lulusan SMK kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (491 Orang)**

- **T4.S1.1.1.3 Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (70 Poin)**

- **T4.S1.1.1.4 Jumlah Lembaga/ Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (3.368 Unit)**

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (SP)	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM BP2SDM	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	PAGU ALOKASI ANGGARAN		UKE II / UPT		
						TARGET	ALOKASI (Ribu Rupiah)			
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi SP: T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas IOP: T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan IK BP2SDM: - T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya - T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat - T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan - T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK SK: 1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan 2. Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Nilai KHDTK yang Dikelola (70Poin) 2. Lulusan Diklat Aparatur LHK (4.335 Orang) 3. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (1.240 Orang) 4. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (7.840 Orang) 5. Lulusan Pendidikan Karya Siswa (10 Orang)	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit	3.290.000	Pusdiklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK		
				BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pengelolaan KHDTK	1 Layanan	300.000			
				DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	4.335 Orang	28.097.405			
				SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	1.240 Orang	3.055.000			
					002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	7.840 Orang	16.430.000			
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang	1.745.850			
		6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan SK: Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (491 Orang)	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	491 Orang	59.213.780	Pusdiklat SDM LHK dan SMK Kehutanan Negeri		
						BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pembinaan SMK Kehutanan		1 Layanan	2.719.934
						RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah		5 Paket	6.131.465

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (SP)	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM BP2SDM	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	PAGU ALOKASI ANGGARAN		UKE II / UPT
						TARGET	ALOKASI (Ribu Rupiah)	
				RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1 Unit	50.273.160	
					002-Renovasi Gedung/ Bangunan Sekolah	4 Unit	6.908.821	
					003-Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (RM)	1 Unit	1.025.000	
		6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan/atau berbudaya LHK (3.368 Lembaga)	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	3.350 Lembaga	3.850.000	Pusat Pengembangan Generasi LHK dan Balai Pelatihan LHK
		SK: 1. Terwujudnya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2. Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas (720 Orang)		002-Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	18 Lembaga	540.000	
		2. Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan		BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	720	2.445.000	
		6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	1. Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (1.500 Orang)	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM	1.500 Orang	1.918.000	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM
		SK: Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK	2. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Dokumen	1.020.000	
			3. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)		002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Dokumen	1.170.000	
TOTAL							190.134.415	

Sasaran Strategis KLHK: T4.S2 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK: T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja BP2SDM : T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (80 Poin)

PROGRAM / SASARAN PROGRAM	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM BP2SDM	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	PAGU ALOKASI ANGGARAN	
						TARGET	ALOKASI (Ribu Rupiah)
029.WA-Program Dukungan Manajemen SP: T4.S2 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien IOP: T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK IK BP2SDM: T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM SK: Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (80 Poin) 2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 4) 3. Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 dok) 4. Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (97,25 Poin)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	15 Layanan	160.128.389
					Layanan Umum	12 Layanan	17.284.560
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	11 Paket	3.781.620
					Layanan Prasarana Internal	3 Paket	750.000
TOTAL							181.944.569

Matriks Rencana dan Kegiatan Tahun 2024 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

029.DL-PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)
Kegiatan: 6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK							52.918.255						
Sasaran Kegiatan:													
1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan													
2. Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
1.	Nilai KHDTK yang Dikelola				70	Poin							
		CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat		7	Unit	3.290.000	Wilayah Pelayanan BPLHK: Pematangsiantar, Pekanbaru, Kadipaten, Bogor, Makassar, Samarinda, Kupang					Mitigasi Perubahan Iklim
			<i>051-Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran Kediklatan</i>		7	Unit	3.290.000						
		BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pengelolaan KHDTK		1	Layanan	300.000	Pusat Diklat SDM LHK - Bogor					
			<i>051-Layanan Pengelolaan KHDTK</i>		1	Layanan	300.000						
2.	Lulusan Diklat Aparatur LHK				4.335	Orang							
		DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan		4.335	Orang	28.097.405	Wilayah Pelayanan Pusdiklat SDM LHK dan BPLHK: Pematangsiantar, Pekanbaru, Kadipaten, Bogor, Makassar, Samarinda, Kupang					Anggaran Responsif Gender
			<i>051-Diklat Teknis dan Fungsional</i>		4.335	Orang	2.480.000						
			<i>055-Pendukung Kediklatan</i>		8	Laporan	575.000						
3.	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK				1.240	Orang							
		SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan		1.240	Orang	3.055.000	Wilayah Pelayanan Pusdiklat SDM LHK dan BPLHK: Pematangsiantar, Pekanbaru, Kadipaten, Bogor, Makassar, Samarinda, Kupang	02-Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	PN 01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Anggaran Responsif Gender
			<i>051-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan</i>		1.240	Orang	2.480.000						
			<i>055-Pendukung Kediklatan</i>		8	Laporan	575.000						

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)
4.	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha		7.840	Orang							
					7.840	Orang	16.430.000	Wilayah Pelayanan Pusdiklat SDM LHK dan BPLHK: Pematangsiantar, Pekanbaru, Kadipaten, Bogor, Makassar, Samarinda, Kupang	02-Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	05-Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	PN 01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Anggaran Responsif Gender; MP 44- Pengelolaan Terpadu UMKM
				051-Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	7.840	Orang	15.680.000						
				055-Pendukung Kediklitan	8	Laporan	750.000						
5.	Lulusan Pendidikan Karya Siswa	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK		10	Orang							
					10	Orang	1.745.850	Pusat Diklat SDM LHK - Bogor					
				051-Pendidikan program S2 dalam negeri	7	Orang	861.250						
				052-Pendidikan program S3 dalam negeri	3	Orang	526.000						
				053-Pengelolaan pendidikan lanjutan	1	Laporan	358.600						
Kegiatan: 6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan							126.273.160						
Sasaran Kegiatan:													
1. Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
1.	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat		491	Orang							
					491	Orang	59.213.780	Wilayah Pelayanan SMKKN: Pekanbaru, Kadipaten, Makassar, Samarinda, Manokwari	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	PN 03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Anggaran Pendidikan
				051-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kehutanan	491	Orang	46.996.440						
				052-Penetapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015	5	Dokumen	290.000						
				053-Dokumen Perencanaan dan Pembinaan	5	Dokumen	7.305.805						
054-Publikasi Pendidikan	5	Dokumen	660.000										

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)
				055-Kerjasama Pendidikan	5	Dokumen	250.000						
				056-Operasional bakti alumni di bidang LHK	5	Laporan	3.711.535						
	BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pembinaan SMK Kehutanan			1	Layanan	2.719.934	Pusat Diklat SDM LHK - Bogor					Anggaran Pendidikan
				051-Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	1	Layanan	2.719.934						
	RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah			5	Paket	6.131.465	Pekanbaru, Kadipaten, Makassar, Samarinda, Manokwari	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Anggaran Pendidikan
				051-Pengadaan Peralatan/Sarana Pendidikan Sekolah	5	Paket	6.131.465						
	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)			1	Unit	50.273.160	Sorong	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Anggaran Pendidikan
				051-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1	Unit	50.273.160						
		002-Renovasi Gedung/ Bangunan Sekolah			4	Unit	6.909.821	Pekanbaru, Kadipaten, Makassar, Samarinda	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Anggaran Pendidikan
				051-Renovasi Gedung/ Prasarana Sekolah	4	Unit	6.909.821						
		003-Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah			1	Unit	1.025.000	Manokwari	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Anggaran Pendidikan
				052-Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah	1	Unit	1.025.000						
Kegiatan: 6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan							6.835.000						
Sasaran Kegiatan:													
1. Terwujudnya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan													
2. Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
1.	Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/ Komunitas yang Peduli dan/atau berbudaya LHK				3.368	Lembaga							

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)
		QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan		3.350	Lembaga	3.850.000	Regional Sumatera; Regional Jawa; Regional Bali – Nusra; Regional Kalimantan; Regional Sulawesi dan Maluku; Regional Papua.	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	PN 06- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Adaptasi Perubahan Iklim
				051-Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	3.350	Lembaga	3.850.000						
			002-Lembaga Masyarakat/ Komunitas yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan		18	Lembaga	540.000	Regional Bali Nusra; Regional Sumatera; Regional Kalimantan.	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	PN 06- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
				051-Pembinaan Gerakan Masyarakat Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	18	Lembaga	540.000						
		BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan		720	Orang	2.445.000	Ciamis, Depok, Jatim, Samarinda; Wilayah Pelayanan BPLHK: Pekanbaru, Kadipaten, Bogor, Makassar, Kupang					
				051-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	720	Orang	2.090.000						
				052-Pembinaan dan pendampingan kader wirausaha kreatif	8	Laporan	355.000						
Kegiatan: 6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM							4.108.000						

Sasaran Kegiatan:

1. Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK

Indikator Kinerja Kegiatan:

1.	Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi				1.500	Orang							
		EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK		1.500	Orang	1.918.000	Seluruh Indonesia					Anggaran Responsif Gender
				051-Pengujian Kompetensi / Sertifikasi SDM LHK	1.500	Orang	1.350.000						
				052-Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK	1	Dokumen	568.000						

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)
2.	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK				5	Jenis Jabatan							
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK		5	Dokumen	1.020.000	Jakarta					Anggaran Responsif Gender
				051-Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5	Dokumen	1.020.000						
3.	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK				5	Jenis Jabatan							
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK		5	Dokumen	1.170.000	Jakarta					
				051-Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5	Dokumen	1.170.000						

029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)	
Kegiatan: 5444-Peningkatan Penyuluhan							5.538.607							
Sasaran Kegiatan:														
1. Meningkatkan Kapasitas Penyuluh														
2. Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat														
Indikator Kinerja Kegiatan:														
1.	Jumlah KTH (KTH Mandiri)				100	Unit								
		QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri yang terbentuk		100	Kelompok Masyarakat	1.600.000	Aceh, Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sultra		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggaran Responsif Gender
				051-Pembentukan KTH Mandiri	50	Kelompok Masyarakat	1.000.000							
				052-Pembinaan KTH Mandiri	50	Kelompok Masyarakat	300.000							
				053-Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	1	Dokumen	300.000							

No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)
2.	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan				50	Unit							
		QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang		50	Kelompok Masyarakat	1.538.607		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			051-Pembentukan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)		30	Kelompok Masyarakat	938.607	Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua, Sulbar					
			052-Pengembangan dan Pembinaan LP2UKS (Wanawiyata Widyakarya)		20	Kelompok Masyarakat	600.000	Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Babel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, NTB, Kalsel, Maluku Utara, Sulbar					
3.	Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal)				1.000	Orang							
		QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal		1.000	Orang	2.400.000	Seluruh Indonesia	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			051-Peningkatan Kapasitas Ketenagaan Penyuluhan		1.000	Orang	2.000.000						
			052-Metode dan Materi Penyuluhan		1	Dokumen	400.000						

029.WA-Program Dukungan Manajemen

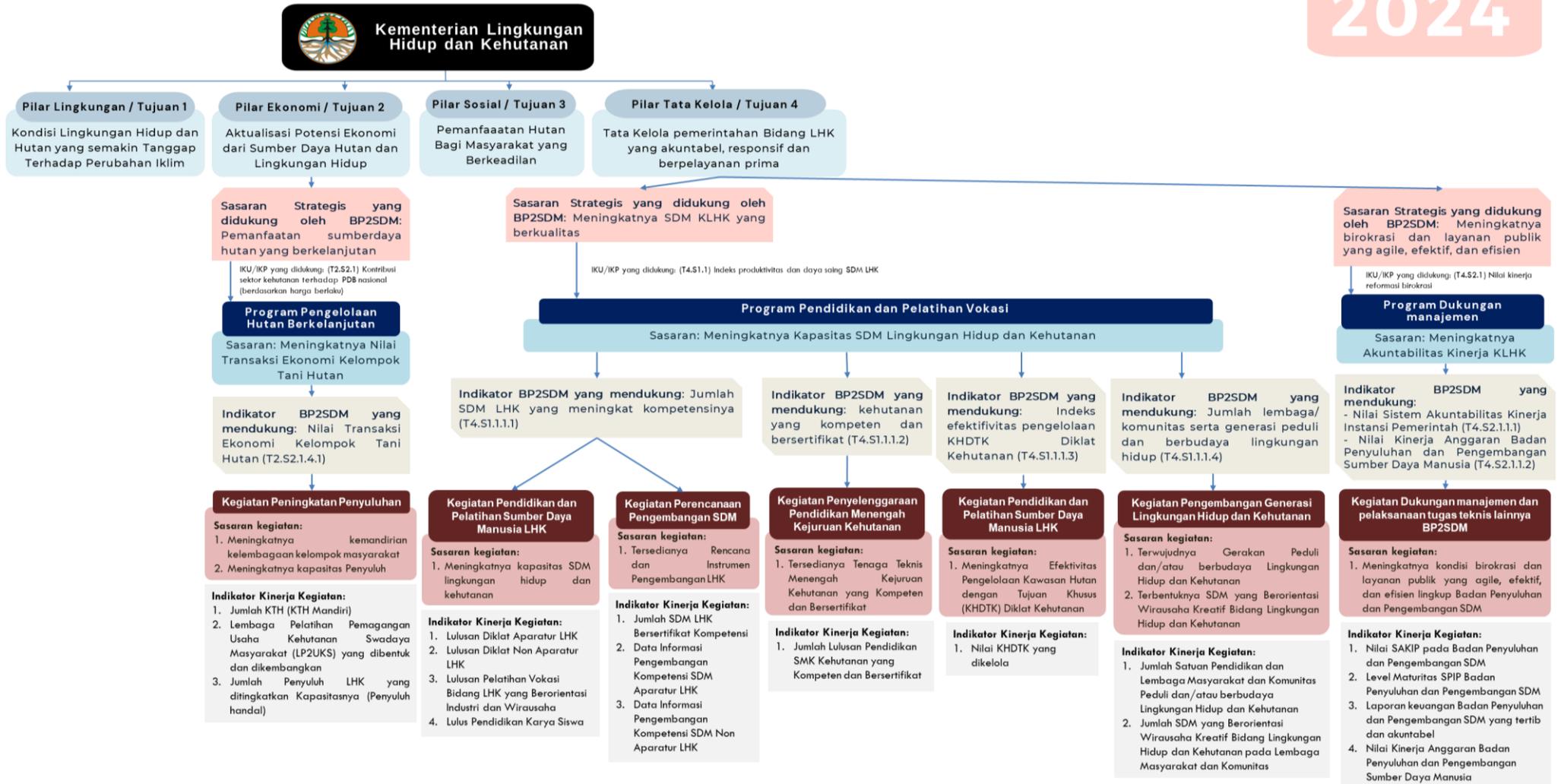
No.	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan/	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Alokasi (Ribu Rupiah)	Lokasi	Pro PN	Kegiatan Prioritas	Program Prioritas	Prioritas Nasional	Dukungan (Tematik)
Kegiatan: 5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM							181.944.569						
Sasaran Kegiatan:													
1. Meningkatkan Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM													
Indikator Kinerja Kegiatan:													
1.	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM				80	Poin							
2.	Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM				4	Level							
3.	Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel				1	Dokumen							
4.	Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				97,25	Poin							
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran		15	Layanan	160.128.389	Seluruh Satker Lingkup BP2SDM					
			001-Gaji dan Tunjangan		15	Layanan	113.206.294						
			002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		15	Layanan	46.922.095						
			Layanan Umum		12	Layanan	17.284.560	Seluruh Satker Lingkup BP2SDM kecuali Pusdiklat SDM LHK dan SMKKN					
			051-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1	Layanan	4.870.000						
			052-Layanan Dukungan Manajemen Satker		12	Layanan	12.414.560						
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal		11	Paket	3.781.620	Seluruh Satker Lingkup BP2SDM kecuali SMKKN					
			051-pengadaan sarana fasilitas perkantoran (paket)		11	Paket	3.781.620						
			Layanan Prasarana Internal		3	Paket	750.000	Pusdiklat SDM LHK, BPLHK Pematangsiantar, BPLHK Kadipaten					
			051-Renovasi Gedung dan Bangunan (paket)		3	Paket	750.000						

Keterangan: - PN = Prioritas Nasional

- MP = Major Project

Pohon Kinerja Badan P2SDM

POHON KINERJA BP2SDM 2024



Tim Penyusun



RENCANA KERJA BADAN P2SDM TAHUN 2024

Naskah dan tata letak disiapkan oleh
Iman Santoso, Niken Probolaras,
Hasto Nugroho, Dita Haristyaningrum,
Sofian Hadi Prasetyo

Editor Sekretaris Badan Penyeluhan
dan Pengembangan SDM

Foto dari berbagai kondisi existing
kegiatan Badan Penyeluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia.



Dokumen Digital

Dokumen digital Rencana
Kerja BP2SDM Tahun 2024 ini
dapat diakses dengan
memindai kode batang di
bawah :





Diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14
Jl. Gatot Subroto - Jakarta, 10270
(021) 5730131 Fax. 5730131
setbp2sdm@menlhk.go.id



2024

Rencana Kerja BP2SDM